

Peranan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Rangka Mitigasi Bencana

Vevi Sunarti, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP
vj_vevi@yahoo.com

Abstract

The role of non formal education oriented toward change and micro-social behavior in the short term. Disaster mitigation is a series of efforts to reduce disaster risk, either through physical development or awareness and increased capacity in dealing with hazards disaster. Disaster education is one way of mitigation that can be done in the community such as the institute courses, learning centers (PKBM), and other study groups. Disaster education to the community is an important part that should not be overlooked. Public awareness in disaster prone areas is absolutely necessary, because without awareness, attitude and character of disaster conscious will not grow. So that when disaster strikes all the people will not be confused, panic, because it has been studied disaster education.

Keyword: disaster, mitigation, disaster education

1. Pendahuluan

Pendidikan luar sekolah atau yang juga dikenal dengan Pendidikan Non Formal (PNF) dan pendidikan informal (pendidikan dalam keluarga) merupakan bagian dari jalur pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia, berbeda dengan pendidikan formal yang dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Adapun fungsinya ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Menurut M. Saleh Marzuki (2005) peranan PLS dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat masih belum dikenal oleh banyak kalangan termasuk para pendidik. Ada beberapa alasan mengapa PLS kurang dikenal dan dipahami secara tepat antara lain: 1) program diartikan secara sempit seperti pemberantasan buta aksara, Paket A, Paket B dan Paket C; 2) aktifitasnya pasang surut; 3) programnya kurang melibatkan stakeholders; 4) belum merupakan inisiatif sendiri; 5) dipersepsi sebagai sarana politik; 6) dipersepsi sebagai sarana pendukung pemimpin lokal dan 7) kurang pahalannya para pengambil keputusan pendidikan di kalangan pemerintah.

Sumatera Barat merupakan salah satu “*supermarket*” bencana di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari rentetan peristiwa yang terjadi seperti gempa bumi tahun 2009, gempa dan tsunami mentawai tahun 2010, gempa padang panjang tahun 2012 ataupun bencana

kebakaran yang hampir terjadi setiap harinya. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi dampak dan resiko bencana yang ditimbulkan, salah satunya adalah melalui pendidikan.

Masyarakat yang terancam bencana sangat beragam, baik terdidik maupun yang masih belum tersentuh pendidikan semuanya perlu diberi pemahaman pentingnya pengurangan resiko bencana, dan salah satu cara adalah melalui pendidikan mitigasi bencana yang dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan nonformal (PNF) atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mempunyai peranan yang strategis dalam memberikan pendidikan kebencanaan dan mitigasi di tengah-tengah masyarakat karena bisa menjangkau berbagai kalangan dan kelompok masyarakat.

Dampak bencana yang sangat luar biasa selama ini terjadi lebih sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta mitigasi dalam mengurangi dampaknya. Mitigasi merupakan bagian dari kegiatan pra bencana, sedangkan pra bencana merupakan bagian dari siklus manajemen bencana (Nirmalawati, 2011).

Bencana bisa terjadi melalui suatu proses yang panjang atau situasi tertentu dalam waktu yang sangat cepat tanpa adanya tanda-tanda (Fidel, 2005). Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana namun jauh sebelum terjadinya bencana tindakan pencegahan dan mitigasi sudah dimulai, dimana hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan baik jiwa ataupun harta. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Artinya bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU nomor 24 tahun 2007).

Pengurangan Resiko Bencana (PRB) melalui pendidikan kebencanaan dapat diberikan melalui sistem pendidikan formal dan non formal yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku dalam upaya mengurangi resiko bencana serta menjadikan upaya pengurangan resiko bencana menjadi budaya masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Priyanto (2006), bahwa pengetahuan terkait dengan persiapan menghadapi bencana pada kelompok rentan bencana menjadi fokus utama.

Masih rendahnya pendidikan kebencanaan di tengah masyarakat khususnya pada pendidikan luar sekolah, dapat dilihat masih adanya kasus kehilangan atau rusaknya alat deteksi tsunami di pantai, sirene atau alarm kebakaran di gedung yang dirusak atau dipecahkan, pohon-pohon yang ditebang sembarangan tanpa memperhatikan keseimbangan hutan, eksplorasi bahan galian yang sembarangan, perilaku ugal-ugalan di jalan raya ini semua merupakan contoh dari gagalnya pendidikan kebencanaan di tengah masyarakat. Indikasi lainnya dapat juga dilihat pada waktu terjadinya bencana, dimana kawasan bencana dijadikan "objek wisata" bencana oleh sebagian masyarakat lain. Jika dilihat dari korban yang ditimbulkan kebanyakan adalah anak-anak, sehingga juga akan berefek terhadap mental karena meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi anak-anak di masa yang akan datang.

Menurut Susanto (2006) bahwa tidak mudah untuk menerapkan berbagai kebijakan dalam suasana bencana, karenanya dalam masa-masa normal (pra bencana) perlu terus

dilakukan kesiapan yang meliputi pencegahan, mitigasi termasuk langkah-langkah kesiapsiagaan, disamping itu juga harus terus dilakukan penyuluhan dan sosialisasi secara luas agar masyarakat memiliki kemampuan dan mau berperan aktif mencegah dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi meskipun dengan skala kecil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka salah satu langkah yang ditempuh dalam pendidikan kebencanaan di tengah masyarakat adalah melalui pendidikan luar sekolah bisa berupa penyuluhan atau sosialisasi, pendidikan dan pelatihan simulasi bencana dan mitigasinya, sehingga diharapkan nantinya setiap anggota masyarakat dan keluarga sebagai satuan terkecil menjadi pionir dalam melahirkan masyarakat yang sadar dan siaga bencana.

2. Landasan Teori

2.1 Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah sebenarnya sudah ada jauh sebelum pendidikan formal lahir. Pendidikan luar sekolah (PLS) sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru dalam kehidupan manusia (Faure, 1981: 2). Selanjutnya pendidikan luar sekolah menurut Coombs (1983) merupakan kegiatan belajar yang terorganisasi untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu bagi sekelompok sasaran didik yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan.

Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadiannya agar sesuai dengan norma-norma atau aturan di dalam masyarakat. Setiap orang dewasa di dalam masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidik merupakan suatu perbuatan sosial yang mendasar untuk pertumbuhan atau perkembangan anak didik menjadi manusia yang mampu berpikir dewasa dan bijak.

Menurut Sudjana dan Coombs dalam M. Saleh Marzuki (2005) pendidikan nonformal, yang juga dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai istilah menurut perkembangannya, yaitu: Pendidikan Masyarakat (Penmas), Pendidikan Sosial (Pensos), dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), merupakan institusi atau lembaga pendidikan yang memiliki program layanan pendidikan yang luas dan kaya serta spesifik sebagai perwujudan implementasi tentang filsafat pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*). Dengan pendidikan sepanjang hayat, secara sosiologis, psikologis, ekonomis, dan filosofis baik di negara maju maupun negara berkembang kenyataannya sangat membutuhkan PLS yang saat ini lebih dikenal dengan pendidikan nonformal (PNF), karena memang dalam menghadapi pembangunan bangsa dan berbagai permasalahannya, tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan persekolahan atau pendidikan formal (PF) yang ternyata masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan dan kritik terhadapnya.

Menurut Sudjana dan Kamil dalam S. Mundzir (2013) PNF dalam perkembangannya memiliki sejarah yang panjang sepanjang sejarah peradaban manusia sehingga istilah PNF sangat beragam, misalnya: *learning society*, *lifelong learning*, *shogai gakushu*, *recurrent education*, *permanent education*, *community education*, *extention education*, *social education*, *adult education*, dan *continuing education*. Pokok kajian keilmuan Pensos pada saat itu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, dan kajian ini sangat dekat dengan konsep pembangunan masyarakat yang dikembangkan para pakar pembangunan dalam perspektif sosiologi. Perubahan konsep Pensos menjadi PLS juga tidak lepas dari pemikiran pakar PNF pada saat itu, di mana arah pembangunan pendidikan lebih ditekankan pada proses pembelajaran masyarakat sehingga tercipta masyarakat gemar belajar (*learning society*). Sedangkan perubahan nama PLS menjadi Pendidikan Nonformal (PNF) mengikuti perkembangan Undang-Undang Republik Indonesia

No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pada pasal 1 (satu) ayat 10 disebutkan tentang satuan pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal.

Menurut Boyle dalam M. Saleh Marzuki (2005) ruang lingkup PLS dilihat dari jenis programnya dibagi ke dalam 3 jenis yaitu; 1) informasional, 2) institusional dan 3) developmental. Callawarry dalam M. Saleh Marzuki (2005) program PLS dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu; 1) program keaksaraan; 2) program yang berhubungan dengan pekerjaan; 3) program perluasan (pertanian, industry); 4) program pengembangan masyarakat.

David Evans dalam M. Saleh Marzuki (2005) mengkategorikan PLS berdasarkan peranan dan fungsinya menjadi; 1) *Complementary education*; 2) *Supplementary education*; 3) *Replacement education*. *Complementary education* berfungsi melengkapi pelajaran di sekolah karena biasanya kegiatan belajarnya tidak cocok disajikan di lokal atau sekolah. *Supplementary education* adalah sebagai tambahan pendidikan setelah tamat dari sekolah, karena di sekolah tidak mendapatkannya. *Replacement education* merupakan pendidikan bagi yang tidak dapat menikmati sekolah, biasanya berupa keterampilan dasar membaca, menulis dan berhitung dan pengetahuan-pengetahuan praktis seperti kesehatan, nutrisi, pertanian dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari literatur ataupun pelaksanaan program, PLS diarahkan kepada perubahan sosial dan perubahan perilaku. Eitzen dalam M. Saleh Marzuki (2005) mengemukakan bahwa PLS merupakan gerakan sosial yang sifatnya reformatif karena ia berusaha mengubah bagian penting dari suatu masyarakat seperti memperbaiki pendidikan wanita, memperbaiki lingkungan, usaha kecil dan lain-lain. Di Amerika Latin PLS merupakan upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan sosial pada tingkat lokal. Strategi yang digunakan adalah strategi intervensi yang didasarkan pada the man oriented dan holistic approach. (La Belle dalam M. Saleh Marzuki, 2005).

Berdasarkan pendapat di atas, maka peran yang harus dijalankan oleh PLS harus mengarah kepada perubahan tingkah laku dan perubahan sosial terutama pada perubahan sosial mikro. Hal ini berbeda dengan sekolah yang mengarah kepada perubahan sosial jangka panjang dan makro (M. Saleh Marzuki, 2005).

2.2 Mitigasi Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal 1 ayat 1 UU nomor 24 tahun 2007). Rahmat (2006) menyatakan bahwa mitigasi adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negative kejadian bencana terhadap kehidupan dengan menggunakan cara alternatif yang lebih dapat diterima secara ekologi. Bencana ini bisa berupa gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran, angin puting beliung, wabah penyakit maupun kecelakaan lalu lintas dan lainnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, maka penanggulangan bencana sudah dimulai dari tahap pra bencana atau yang lebih dikenal dengan mitigasi bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Resiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui sosialisasi bagaimana menghadapi bencana, simulasi evakuasi bencana, rambu-rambu rawan bencana, membuat jalur evakuasi, pendidikan dan pelatihan menghadapi dan mengurangi dampak bencana, dan lain sebagainya.

Mitigasi bencana bisa berupa mitigasi fisik dan mitigasi non fisik. Mitigasi fisik (*Structure Mitigation*) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur. Sedangkan mitigasi non fisik merupakan (*Non Structure Mitigation*) upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana (Pergub. Sumatera Barat nomor 118 tahun 2008).

Zakaria dalam Nirmalawati (2011) menyatakan bahwa tujuan dari mitigasi siaga bencana adalah: (1) untuk meningkatkan pemahaman semua pihak tentang pentingnya mitigasi siaga bencana dalam upaya mengurangi risiko bencana; (2) untuk meningkatkan upaya-upaya mitigasi siaga bencana; (3) mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintahan, antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan upaya mitigasi siaga bencana; dan (4) memberikan panduan bagi instansi-instansi di lingkungan pemerintah.

Menurut Nirmalawati (2011) bencana dapat terjadi karena ditimbulkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya pemahaman tentang karakteristik bencana, (2) sikap atau perilaku yang mengakibatkan kualitas sumber daya alam, (3) kurangnya informasi peringatan dini, dan (4) ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi bahaya. Karena bencana merupakan suatu proses kejadian, maka diperlukan suatu penanganannya dalam manajemen bencana, yaitu dimana seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana dimana di kenal dengan "Siklus Manajemen Bencana".

Siklus manajemen bencana dibagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu: (1) kegiatan pra bencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini); (2) kegiatan saat terjadi bencana (tanggap darurat, seperti SAR, bantuan darurat dan pengungsian); dan (3) kegiatan pasca bencana (pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi). Kegiatan pra bencana inilah yang sering dilupakan, padahal justru kegiatan pada prabencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana.

Menurut Agus Rahmat dalam artikel Manajemen dan Mitigasi Bencana secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana selama ini masih kurang menjadi perhatian, padahal kegiatan ini sangat penting karena merupakan modal sebagai persiapan dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta

memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Berdasarkan Konferensi Pengurangan Bencana Dunia, substansi dasar yang merupakan prioritas kegiatan mitigasi sampai tahun 2015, antara lain:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.

Selanjutnya menurut Agus Rahmat dalam artikel Manajemen dan Mitigasi Bencana, mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan.

1. Penilaian bahaya (*hazard assessment*); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan asset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana dimasa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya.
2. Peringatan (*warning*); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.
3. Persiapan (*preparedness*). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

3. Pendidikan Kebencanaan Dalam Masyarakat

Menurut Triutomo dalam Nirmalawati (2011), bahwa masih banyak penduduk yang menganggap bahwa bencana itu merupakan suatu takdir. Pada umumnya mereka percaya bahwa bencana itu adalah suatu kutukan atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, sehingga merasa tidak perlu lagi berusaha untuk mempelajari langkah-langkah pencegahan. Sedangkan menurut pendapat Priyanto (2006) bahwa pengetahuan partisipan mengenai gempa bumi berhubungan dengan tingkat kesiapannya menghadapi gempa bumi.

Zakaria dalam Nirmalawati (2011) menyatakan bahwa kesiapsiagaan yang perlu dilakukan oleh masyarakat, diantaranya adalah (a) Memahami bahaya yang timbul oleh bencana, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana perlu memahami bahaya yang mungkin dialami ketika bencana datang, kapan bencana tersebut datang di daerah tersebut, daerah mana saja yang aman untuk menghindari bencana. (b) Menyiapkan peta daerah rawan bencana; peta daerah rawan bencana didasarkan pada berbagai penyebab dan risiko bencana (geologis dan klimatologis) sebagai salah pertimbangan perencanaan pembangunan dan penanggulangan untuk pencegahan bencana, di dalam peta perlu dilampirkan keterangan seperti tingkat risiko, jumlah penduduk, jumlah lahan, ternak, dan sebagainya serta sangat penting mencantumkan tempat aman dan jalur aman yang dapat dilalui untuk evakuasi.

Menurut Susanto (2006) bahwa tak gampang untuk menerapkan berbagai kebijakan dalam suasana bencana. Karenanya dalam masa-masa normal perlu terus dilakukan kesiapan yang meliputi pencegahan, mitigasi termasuk langkah-langkah kesiapsiagaan. Juga harus terus dilakukan penyuluhan dan sosialisasi secara luas agar masyarakat memiliki kemampuan dan mau berperan aktif mencegah dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi meskipun dengan skala kecil.

Menurut pendapat Kodoati dan Syarief (2006), bahwa tindakan-tindakan mengurangi dampak banjir pada individu dan masyarakat dilakukan dengan informasi dan pendidikan, sehingga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir akan lebih efektif lewat jalur pendidikan. Oleh Karena itu pemahaman tentang sumber bahaya dan potensi bencana kepada masyarakat hendaknya diintensifkan dengan diselenggarakannya pendidikan dan latihan, penyebaran brosur, pamflet, sehingga dapat meningkatkan kesadaran publik akan bencana.

Minimnya alat petunjuk dan peraga dalam rangka antisipasi bencana menyebabkan banyak anak-anak dan bahkan orang dewasa sekalipun akan panik ketika bencana terjadi. Kesadaran akan pentingnya alat-alat peraga, peta dan penunjuk jalur evakuasi, peringatan-peringatan, tas siaga bencana dan lain sebagainya akan tetap terjaga dan terawat jika masing-masing keluarga dalam masyarakat menyadari dan mengajarkan serta saling mengingatkan antar masing-masing anggota keluarga tentang pendidikan kebencanaan, sehingga nantinya akan melahirkan generasi yang sadar dan peduli bencana.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi bencana ini seringkali terabaikan pada masyarakat yang belum memiliki pengalaman langsung dengan bencana. Salah satu indikator kurangnya kesadaran bencana adalah banyaknya alat-alat peraga bencana, peta, petunjuk jalur evakuasi, sistem peringatan dini bencana baik gempa/tsunami, alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR) yang banyak tidak berfungsi, dirusak atau bahkan hilang.

Beberapa langkah konkret yang dapat ditempuh dalam mengajarkan pendidikan kebencanaan dalam masyarakat melalui pendidikan luar sekolah diantaranya adalah : 1) Sosialisasi dan simulasi dengan memberikan pemahaman kepada setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat keluarga terhadap setiap bahaya yang terjadi serta sifat-sifatnya, yaitu: (a) penyebab-penyebabnya misalnya bermain api/lilin, petasan dan colokan listrik yang menumpuk akan berakibat kebakaran, buang sampah sembarangan akan berakibat banjir; (b) ukuran atau tingkat kerusakan dan kemungkinan frekuensi kemunculannya; (c) elemen-elemen yang paling rentan terhadap kerusakan; (d) kemungkinan-kemungkinan konsekuensi sosial dan ekonomi dari bencana; (e) mengetahui daftar urutan bahaya-bahaya sesuai dengan daerah masing-masing; (f) menyiapkan tas siaga bencana dan memberitahukan kepada setiap anggota keluarga yang berisi dokumen-dokumen penting, mie instan, roti gandum, air

mineral; 2) Dalam periode-periode tertentu antar keluarga dalam satu RW atau kelurahan melakukan simulasi bagaimana menghadapi berbagai jenis bencana yang terjadi; 3) Memberikan berbagai contoh tanda-tanda adanya terjadi bencana misalnya bencana gempa bumi, bencana tsunami, banjir, gunung berapi, tanah longsor; 4) Memberitahukan daerah-daerah yang harus dihindari jika bencana terjadi sekaligus jalur evakuasi ataupun shelter atau tempat evakuasi sementara; 5) Menempelkan atau mencatat nomor-nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran, kantor polisi, kantor PLN, Badan SAR, ketua RT atau nomor-nomor telepon yang dianggap penting jika terjadi bencana.

4. Pembahasan

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal 1 ayat 1 UU nomor 24 tahun 2007). Disamping bencana yang disebabkan oleh faktor alam, bencana yang disebabkan oleh faktor non alam seperti kebakaran, wabah penyakit, kecelakaan di jalan raya, tawuran pelajar, tawuran antar kampung atau kelompok juga rawan terjadi.

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan kebencanaan dalam rangka mitigasi bencana pada setiap anggota masyarakat mutlak harus dilakukan karena merupakan salah satu solusi mitigasi non fisik. Untuk mendapatkan hasil guna yang efektif dalam program Pengurangan Resiko Bencana (PRB) secara fisik maupun nonfisik, pendidikan formal saja tidak akan cukup mengingat rumitnya masalah. Untuk mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan dari semua risiko bencana tersebut diperlukan kegiatan pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan dengan mengoptimalkan peranan dari Pendidikan Luar Sekolah.

Berdasarkan data BPNB Sumbar untuk gempa bumi tahun 2009 yang melanda kota Padang dan sekitarnya diketahui jumlah korban meninggal sebanyak 1.117 orang, 2 orang hilang, 1.214 orang luka berat. Data korban lainnya adalah luka berat 1.214 orang dan luka ringan 1.688. Untuk data kerusakan, tercatat 135.448 rumah penduduk rusak berat, 65.280 rusak sedang, dan 78.604 rusak ringan. Untuk kerusakan sarana fasilitas umum, tercatat jumlah kerusakan sebanyak 2.163 ruang pendidikan, 51 unit fasilitas kesehatan, 1.001 rumah ibadah, 21 unit jembatan, 178 unit ruas jalan, dan 130 irigasi rusak berat. Dari data tersebut diketahui bahwa sebanyak 2.163 ruang pendidikan mengalami kerusakan dan salah satu tempat ditemukan korban khususnya anak-anak meninggal ataupun luka berat adalah di tempat bimbingan belajar GAMA dan LIA.

Pendidikan luar sekolah yang menjangkau berbagai kalangan khususnya yang tidak mampu menikmati pendidikan formal di bangku sekolah, maka pemerintah dapat menggunakan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat, kelompok yasinan, kelompok tani, lembaga kursus sebagai sarana pembelajaran bagi warga belajar atau anggota kelompok untuk mengetahui dan memahami mitigasi bencana sebelum terjadi, saat bencana berlangsung ataupun pasca bencana terjadi.

Lembaga kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu contoh pendidikan luar sekolah. Berdasarkan pengalaman gempa diatas, agar kasus serupa tidak terulang lagi dengan memakan korban yang cukup banyak, maka salah satu cara

mitigasi bencananya adalah dengan memberikan pendidikan kebencanaan kepada pemilik, instruktur, tutor maupun peserta bimbingan belajar atau warga belajar.

Pendidikan kebencanaan yang diberikan kepada para pemilik, instruktur, tutor dan para peserta atau warga belajar adalah dengan memberikan pelatihan atau simulasi, sosialisasi yang terjadwal dan berkelanjutan di setiap lembaga kursus ataupun PKBM. Dalam memberikan pendidikan kebencanaan terhadap mereka, maka pemerintah dapat bekerjasama dengan para aktivis peduli bencana, perguruan tinggi dan pihak lain untuk menyiapkan modul-modul pendidikan kebencanaan dengan konsep pendidikan luar sekolah. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan dalam upaya pengurangan resiko bencana atau mitigasi meliputi 4 kerangka konseptual oleh Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015 yaitu: 1) *Awareness* (perubahan perilaku); 2) *Knowledge Development* (salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan); 3) *Public Commitment* dan 4) *Risk Assessment* (penilaian resiko).

Salah satu konsep yang digunakan dalam pengurangan resiko bencana atau mitigasi adalah dengan memberikan pendidikan kebencanaan melalui *knowledge development* (pengembangan pengetahuan) yang salah satu caranya adalah dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Nadler dalam M. Saleh Marzuki (2005) dimana PLS dibagi menjadi 3 (tiga) tipe pembelajaran yaitu; pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Disinilah peran penting pendidikan luar sekolah dalam rangka mitigasi bencana diharapkan optimal dilaksanakan oleh pemerintah, pemilik lembaga kursus, instruktur, tutor maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Dari diskusi singkat dengan beberapa tutor di PKBM yang ada di Kota Padang dan instruktur les atau bimbingan belajar juga dengan peserta les atau warga belajar, didapatkan hasil bahwa masih ada diantara mereka yang belum mendapat pendidikan kebencanaan. Untuk itu kepada semua *stakeholders* baik pemerintah, pemilik bimbingan belajar, tutor, penggiat atau aktivis peduli dan siaga bencana, lembaga swadaya masyarakat, NGO, perguruan tinggi dan pihak lain diharapkan dapat bekerjasama dalam melakukan pembelajaran pendidikan kebencanaan khususnya di lembaga atau jalur pendidikan non formal.

Dari penjelasan diatas, sangat terlihat bahwa peranan pendidikan luar sekolah dalam pendidikan kebencanaan sangat penting untuk diintensifkan lagi dengan melibatkan semua *stakeholders*. Kesadaran dari pemilik lembaga kursus atau pengurus PKBM dengan membuat peta bencana, peringatan-peringatan di setiap ruangan, petunjuk atau jalur evakuasi, sistem peringatan dini terhadap kebakaran ataupun himbauan-himbau yang berkelanjutan dan terjadwal adalah salah satu langkah konkret yang bisa ditempuh.

Bagi para pendidik pendidikan luar sekolah, pemahaman terhadap modul-modul dan pengintegrasianya ataupun menyelipkan pesan-pesan mitigasi bencana disetiap kesempatan dengan kemasan yang inovatif akan menjadikan pendidikan kebencanaan semakin akrab dengan peserta didik ataupun warga belajar. Melalui nyanyian sebelum bimbingan belajar dimulai ataupun dengan pemutaran video bagaimana menghadapi bencana merupakan salah satu metode yang bisa digunakan juga oleh para instruktur atau tutor.

Kerjasama lain yang bisa juga dijalin oleh para pengelola PKBM, pemilik kursus, kelompok-kelompok di setiap lingkungan masyarakat adalah membuat komunitas siaga bencana sehingga pada gilirannya akan melahirkan masyarakat sadar bencana. Ditempat kursus misalnya, pendidikan kebencanaan juga bisa dikemas dengan menggandeng radio siaga bencana dengan mengadakan *talkshow* dan tentunya dengan kemasan acara yang

menarik, karena hampir disetiap lembaga kursus atau PKBM mempunyai jadwal atau acara *fun day* setiap bulannya.

Jika sinergitas antara masyarakat, pemilik lembaga kursus, pengelola PKBM, instruktur, tutor, akademisi, perguruan tinggi dengan pemerintah ataupun pemangku kepentingan berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkan nantinya akan melahirkan generasi yang sadar bencana sehingga tidak ada lagi kita mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang hilang atau dirusak, tawuran antar pelajar atau kampung, kecelakaan di jalan raya akibat perilaku ugal-ugalan dari pengguna jalan raya. Andai pun nanti bencana terjadi maka kita berharap dengan adanya pendidikan kebencanaan dalam keluarga ini resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat diminimalisir.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah harus menjalankan perannya yang mengarah kepada perubahan tingkah laku dan perubahan mikro sosial jangka pendek, sehingga PLS sangat cocok digunakan sebagai salah satu cara memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi bencana. Peran pendidikan luar sekolah dalam rangka mitigasi bencana dapat ditempuh dengan memberikan pendidikan kebencanaan di lembaga kursus, PKBM, kelompok belajar, kelompok pengajian dan lainnya. Pendidikan kebencanaan di lembaga kursus ataupun pendidikan luar sekolah lainnya merupakan tanggungjawab pemilik atau pengelola, instruktur, tutor dengan bersinergi dengan lembaga lain yang difasilitasi oleh pemerintah, akademisi, LSM ataupun aktivis peduli bencana.

Sebagai saran diharapkan kepada pemerintah secara periodik melakukan simulasi bencana dimulai dari lingkungan terkecil seperti RT/RW, kelurahan, lembaga kursus, kelompok pengajian dan lainnya. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana ataupun perguruan tinggi diharapkan merumuskan tentang mitigasi bencana ke dalam modul-modul singkat khususnya dengan mengintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan luar sekolah. Sebagai langkah mitigasi bencana juga diharapkan kepada instansi terkait untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap semua sistem peringatan dini disetiap gedung dan tempat khususnya lembaga pendidikan luar sekolah secara periodik seperti pemeriksaan alat pemadam api ringan, jaringan listrik dan lainnya.

6. Daftar Rujukan

- Kodoatie, Robert dan Roestam. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu* : Banjir, Longsor. Jakarta
- LIPI – UNESCO/ISDR. 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami*. Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- M. Saleh Marzuki, 2005. *Peranan Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Penggerak Pembangunan Dalam Mengatasi Migran Perkotaan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Malang.
- Maimunah Hasan. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Diva Press.

- Mundzir. S. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal. UNP
- Nirmalawati, 2011. Pembentukan Konsep Diri Pada Siswa Pendidikan Dasar Dalam Memahami Mitigasi Bencana. *Jurnal SMARTek*, Vol. 9 No. 1 Februari 2011: 61-69.
- Priyanto. A. 2006. Promosi Kesehatan Pada Situasi Emergensi. Edisi 2, Jakarta.
- Ramli, S., 2010, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (*Disaster Management*). Jakarta: Dian Rakyat.
- Rachmat, A., 2005, Manajemen dan Mitigasi Bencana. Bandung: BPLHD.
- Ramli, S., 2010, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (*Disaster Management*), Jakarta: Dian Rakyat.
- Sitti Irene Astuti D, dkk. 2010. Peran Sekolah Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2010. BNPB.
- Sulistyaningsih, Wiwik. 2012 "Ketangguhan Mental Anak Dalam Menghadapi Bencana", 1"vol 3",25-34
- Susanto. 2006. *Disaster* Manajemen di Negeri Rawan Bencana. Cetakan Pertama, PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta.
- Syamsul, M. 2007. Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir. BNPB Jakarta
- UNDP, 1995, Program dan Pelatihan Manajemen Bencana, Mitigasi Bencana: UNDP.
- 2004, *West Java Province Environmental Strategy*. Bandung: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).
- 2000, *What Is Mitigation? Mitigation: Reduction Risk through Mitigation*. Washington: Federal Emergency
- Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor nomor 118 tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat Tahun 2008 – 2012.